

Abstrak

Tujuan penelitian Disertasi ini adalah: (1) Untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan peretasan data pribadi Perbankan dalam rangka perlindungan nasabah; (2) Untuk menganalisis dan mengkaji urgensi pertanggungjawaban pidana peretasan data pribadi Perbankan dalam rangka perlindungan nasabah perspektif kepastian hukum; (3) Untuk menemukan konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana ke depan terhadap peretasan data pribadi perbankan dalam rangka perlindungan nasabah perspektif kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian Disertasi ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pengaturan mengenai perbankan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang perbankan, akan tetapi perkembangan teknologi dan informasi memunculkan bentuk perbuatan pidana baru dalam dunia perbankan. Guna tercapai kepastian hukum, diperlukan pengaturan tambahan mengenai tindak pidana perbankan, terkait pertanggungjawaban pidana di bidang digital dalam rangka melindungi nasabah berdasarkan prinsip-prinsip perbankan yaitu kepercayaan, kehati-hatian dan rahasia; 2) Urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap perlindungan data pribadi nasabah di era digital mengakibatkan munculnya perbuatan pidana baru yang berpotensi menyalahgunakan data pribadi nasabah secara illegal, serta diperlukan bentuk pertanggungjawaban pidana oleh bank sebagai badan hukum untuk dapat menjaga data pribadi nasabah; 3) Konstruksi hukum ke depan terhadap undang-undang perbankan perlu dirumuskan: 1. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang sepele, korporasi dan pihak terafiliasi dengan bank bahwa setiap tindakan mengambil, memindahkan, memperbanyak, menyabotase dan/atau menghapus secara tanpa hak data pribadi nasabah dalam bentuk data pribadi secara umum dan/atau data pribadi khusus. 2. Merumuskan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap bank yang tidak dapat melindungi data pribadi nasabah merupakan kealpaan dan dikategorikan perbuatan pidana. Pertanggungjawab terhadap kealpaan bank adalah dewan komisaris, dewan direksi dan pegawai bank. Berdasarkan hasil disertasi penulis merekomendasikan sebagai berikut: 1) Perlu pengaturan tambahan dalam undang-undang Perbankan terhadap perlindungan data pribadi nasabah yang sesuai prinsip-prinsip perbankan yaitu kepercayaan, kehati-hatian dan rahasia; 2) Perlu dirumuskan pengaturan pada undang-undang perbankan dengan mengakomodir bentuk kejahatan perbankan baru di era digital. Serta diperlukan bentuk pertanggungjawaban pidana bank dalam rangka menjaga data pribadi nasabah; 3) Perlu adanya pengaturan hukum ke depan terhadap undang-undang perbankan dengan dirumuskan: perbuatan pidana di era digital dan pertanggungjawaban bank yang tidak dapat melindungi data pribadi nasabah merupakan kealpaan dan dikategorikan perbuatan pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawab Pidana, Data Pribadi dan Perlindungan Nasabah.

Abstract

The objectives of this dissertation research are: (1) To analyze and review the regulation of personal data hacking in banking in the context of customer protection; (2) To analyze and review the urgency of criminal liability for personal data hacking in banking in the context of customer protection from the perspective of legal certainty; (3) To find the legal construction of future criminal liability for personal data hacking in banking in the context of customer protection from the perspective of legal certainty. The research method used is normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, a case approach and a comparative legal approach. The results of this dissertation research can be concluded as follows: 1) Regulations regarding banking in Indonesia have been regulated in banking laws, however, the development of technology and information has given rise to new forms of criminal acts in the banking world. In order to achieve legal certainty, additional regulations are needed regarding banking crimes, related to criminal liability in the digital field in order to protect customers based on banking principles, namely trust, prudence and confidentiality; 2) The urgency of criminal liability for the protection of customer personal data in the digital era has resulted in the emergence of new criminal acts that have the potential to misuse customer personal data illegally, and a form of criminal liability is needed by banks as legal entities to be able to protect customer personal data; 3) Future legal construction of banking laws needs to be formulated: 1. Criminal acts committed by individuals, corporations and parties affiliated with banks that any act of taking, moving, reproducing, sabotaging and/or deleting without permission customer personal data in the form of general personal data and/or specific personal data. 2. Formulating a form of criminal liability for banks that cannot protect customer personal data constitutes negligence and is categorized as a criminal act. Responsibility for bank negligence is the board of commissioners, board of directors and bank employees. Based on the results of the dissertation, the author recommends the following: 1) Additional regulations are needed in the Banking Law regarding the protection of customer personal data in accordance with banking principles, namely trust, prudence and confidentiality; 2) There needs to be regulation in banking law by accommodating new forms of banking crimes in the digital era. And a form of criminal liability for banks is needed in order to protect customers' personal data; 3) There needs to be future legal regulation of banking law by formulating: criminal acts in the digital era and the responsibility of banks that cannot protect customers' personal data is negligence and is categorized as a criminal act.

Keywords: Criminal Liability, Personal Data and Customer Protection.